



Menyongsong SDGs: Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia

Kesimpulan dan Implikasi Kebijakan

Prof. Dr. Armida S. Alisjahbana
SDGs Center - Universitas Padjadjaran

**Seminar Nasional
Menyongsong SDGs – Kesiapan Daerah-daerah di Indonesia
Jakarta, 27 November 2017**



Sekali Lagi Tentang SDGs

1. *People, Planet, Prosperity, Peace dan Partnership*
2. *No one left behind*
3. *Holistic and integrated*



Pemetaan Kesiapan Daerah-daerah Provinsi

- Pemetaan yang dilakukan bersifat proyeksi pencapaian target SDGs di tahun 2030 berdasarkan asumsi skenario BAU (*Business-As-Usual*)
- Berdasarkan data historis 10-15 tahun terakhir (tahun baseline: 2015)
- 41 indikator terpilih
- Target konservatif



Pemetaan Kesiapan Daerah-daerah Provinsi

- Indikator yang masih jauh dari target SDGs 2030
 - Terkait SDM (pendidikan menengah, kualitas pendidikan, kesehatan ibu dan anak)
 - Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan
 - Institusi dan Tata Kelola
- Tidak ada pola yang berlaku umum untuk semua daerah, namun bersifat **spesifik per daerah masing-masing**
- Catatan penting dari hasil analisis pemetaan kesiapan pencapaian SDGs: **Masing-masing provinsi** memiliki **keunggulan** dan **kelemahan** sendiri-sendiri.



Merealisasikan Komitmen SDGs

- Pencapaian SDGs akan sangat tergantung dari komitmen yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah, karena keterlibatan pemerintah ada dan dibutuhkan di semua tujuan SDGs
- Hal ini akan menjadi katalis munculnya keterlibatan aktif pemangku kepentingan lainnya, seperti swasta, perguruan tinggi, LSM dan masyarakat
- Salah satu bentuk komitmen pemerintah tersebut adalah Perpres No. 59 tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan, sebagai landasan hukum utama SDGs



Langkah selanjutnya

- Membuat dokumen-dokumen perencanaan implementasi SDGs di Indonesia
- Terdapat 3 dokumen perencanaan berdasarkan Pasal 20 Perpres No. 59/2017:
 1. Rencana Aksi Nasional (RAN) tahun 2017-2019 (dalam tempo 6 bulan setelah Perpres berlaku),
 2. Rencana Aksi Daerah (RAD) tahun 2017-2019 (dalam waktu 12 bulan setelah Perpres berlaku)
 3. Peta Jalan SDGs tahun 2017-2030 (dalam waktu 12 bulan setelah Perpres berlaku)



Langkah selanjutnya

- Identifikasi tujuan-tujuan SDGs yang prioritas, mengingat sumber daya yang terbatas
- Daftar prioritas tersebut harus mencerminkan:
 1. Permasalahan umum pembangunan di seluruh daerah
 2. Permasalahan pembangunan yang bersifat urgen
 3. Tujuan-tujuan SDGs yang memiliki keterkaitan tinggi dengan tujuan lainnya



Area-area Prioritas Pembangunan

1. Pembangunan sumber daya manusia (SDM), khususnya bidang pendidikan dan kesehatan
2. Tersedianya infrastruktur dasar secara penuh, yakni jalan, air bersih, sanitasi layak dan permukiman yang terjangkau serta layak huni
3. Penguatan konektivitas antar wilayah melalui infrastruktur-infrastruktur multi-moda
4. Penghidupan yang layak melalui ketersediaan lapangan kerja yang layak terutama bagi kaum muda
5. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan
6. Penguatan institusi dan tata kelola (good governance)



Upaya Terobosan

Disamping sinergitas dan memastikan efektivitas Program Nasional di daerah, Program Daerah memperkuat dan komplementer dengan Program Nasional →

Diperlukan upaya-upaya terobosan untuk beberapa isu prioritas, seperti:

1. Stunting: Implementasi konsep *continuum of health care*
2. SDM: pendidikan minimal rata mencapai pendidikan menengah atas, kualitas pendidikan menjadi perhatian utama
3. Infrastruktur dasar 100% → pendekatan *demand responsive approach*, contohnya PANSIMAS dan SANIMAS, serta optimalisasi dana desa melalui skema *cash for work*



Upaya Terobosan

4. Kesempatan kerja yang berkualitas bagi kaum muda → pemanfaatan ICT, misalnya bisnis-bisnis berbasis aplikasi teknologi
5. Konektivitas transportasi multi moda → Program tol laut yang dilengkapi dengan penerbangan perintis (Misalnya menggunakan pesawat nasional N219 untuk daerah kepulauan dan daerah terpencil)
6. Institusi dan tata kelola yang baik → optimalisasi penerapan e-governance